



Peran ECPAT Indonesia dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta

Calista Happy Andiani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisipundip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is one of the third largest child sexual tourism destinations in the world. As the capital of Indonesia, DKI Jakarta is the second highest tourist entrance after Bali. In addition, DKI Jakarta is also the main location that has the highest threat of child sexual exploitation in Indonesia. Nevertheless, the Indonesian government has not provided clear protection for children. This study aims to describe the role of ECPAT Indonesia to assist the Indonesian government in dealing with child sexual tourism in DKI Jakarta, using theories of liberal institutionalism, international organizations, and international cooperation. In this study, the role of ECPAT Indonesia was limited from 2012 to 2018. Child sex tourism has rapid development so it needs cooperation from various parties, one of which is ECPAT Indonesia. From 2015 to 2017 cases of commercial sexual exploitation of children were not as high as in previous years. This is inseparable from the collaboration between the Indonesian government and ECPAT Indonesia. The role of ECPAT Indonesia is divided into three sectors, the government, private and community sectors.

Keywords: Child Sex Tourism, ECPAT, Indonesia, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu penyumbang wisatawan mancanegara tertinggi setelah Bali. Menurut Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Catur Laswanto, DKI Jakarta masih berada di posisi kedua target kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara setelah Bali. Hal tersebut dikarenakan kurang lebih 90% wisatawan berkunjung untuk urusan bisnis sekaligus berwisata. (www.bisnis.wisata.co.id, 2016) Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Indonesia, jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2017 melalui bandara Soekarno Hatta DKI Jakarta terus meningkat.

Tabel 1 Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara berdasarkan Pintu Masuk Tahun 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
NGURAH RAI	2.902.125	3.241.889	3.731.735	3.936.066	4.885.062	5.682.248
SOEKARNO-HATTA	2.053.850	2.240.502	2.246.437	2.304.275	2.416.060	2.563.124
KUALANAMU	205.845	225.550	234.724	201.447	211.942	246.551

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

DKI Jakarta menjadi daerah yang dikunjungi para wisatawan datang karena, DKI Jakarta adalah ibukota Indonesia yang menjadi pusat perekonomian dan administrasi di Indonesia. Dengan demikian, DKI Jakarta mudah menarik investor-investor asing maupun lokal untuk menjalankan bisnis. Wisatawan-wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia memiliki berbagai tujuan, salah satunya untuk seks. Seks sebagai tujuan pariwisata seringkali melibatkan anak-anak sebagai korban. (ECPAT Internasional, 2011) Selain itu, latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk masih menjadi salah satu penyebab kejahatan pariwisata seksual terhadap anak. (PSA) (ECPAT Internasional, 2008: 15)

Untuk mencegah terjadinya PSA di DKI Jakarta dan wilayah-wilayah lain di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat sebuah Rencana Aksi Nasional untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak atau RAN TPPO ESKA. RAN TPPO ESKA merupakan program yang berjangka 5 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Namun pada tahun diterapkannya RAN TPPO ESKA tahun 2009-2014 kasus ESKA di Indonesia belum ada penurunan yang signifikan. Bahkan kasus ESKA yang tercatat semakin meningkat. Kasus ESKA yang tercatat oleh Organisasi Perempuan NU menunjukkan bahwa kasus ESKA terus mengalami peningkatan, tahun 2012 sebanyak 1.383 kasus, tahun 2013 meningkat menjadi 2.792 kasus dan pada tahun 2014, jumlah kasus ESKA meningkat menjadi 3.023 kasus.

Karena program dari pemerintah Indonesia belum cukup membantu menurunkan kasus ESKA yang terjadi di Indonesia, penanganan ESKA khususnya kejahatan pariwisata seksual anak perlu mendapat penanganan dari pihak lain. ECPAT merupakan lembaga yang sangat terkait dengan ini. ECPAT merupakan lembaga non pemerintah khusus untuk menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta perkawinan anak. ECPAT dapat membantu mengakomodir kepentingan korban ESKA dan memberikan hak-hak korban agar keadilan terpenuhi. Selain itu ECPAT sebagai lembaga non pemerintah dapat mengawasi kinerja pemerintah untuk menghapus kejahatan ESKA khususnya pariwisata seksual anak. Penelitian ini berusaha mengetahui sejauh mana ECPAT Indonesia dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pariwisata seksual anak yang terjadi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan: Bagaimana peran ECPAT Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pariwisata seksual anak di DKI Jakarta tahun 2012 hingga tahun 2018? Penelitian ini akan menjawab menggunakan teori liberal institusionalisme, konsep organisasi internasional dan konsep kerjasama internasional.

Pemikiran liberal institusionalisme berfokus pada efek manfaat dari institusi internasional. Liberal institusionalisme percaya bahwa institusi internasional dapat membuat

kerja sama lebih mudah. Institusi internasional adalah suatu organisasi internasional seperti Multinational Corporations (MNCs), Intergovernmental Organisations (IGOs), Non-governmental Organisations (NGOs) yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Beberapa asumsi dasar yang dikemukakan oleh kaum liberal institusionalisme, yaitu: (John Baylis, 2011: 122-123) (1) Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, namun bukan satu-satunya aktor penting. (2) Negara merupakan aktor yang rasional sehingga selalu mencari keuntungan semaksimal mungkin dalam segala aspek kepentingan. (3) Kerja sama tidak akan terjadi tanpa adanya permasalahan. (4) Teori liberal institusionalisme lebih relevan dalam isu wilayah, dimana negara memiliki hubungan saling ketertarikan. Sehingga kerja sama akan mudah tercapai diantara keduanya, antara negara dengan institusi apabila terdapat ketertarikan diantara keduanya. (5) Teori liberal institusionalisme melihat bahwa institusional dan rezim merupakan kekuatan yang paling signifikan dalam hubungan internasional. Institusi dalam liberal institusionalisme berperan sebagai penyedia informasi dan kesempatan bernegosiasi, dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri, serta dapat memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional. (Keohane, 1989)

Sesuai dengan teori liberal institusionalisme diatas, institusi adalah sebuah organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan wadah interaksi negara-negara dengan kepentingan yang sama. Menurut Barnett dan Finnemore, organisasi internasional menjadi kuat karena mengejar tujuan sosial internasional yang dianggap menarik oleh negara lain (Michael Barnett, 2005). Untuk menjadi sebuah organisasi internasional diperlukan tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (Archer, 1992) (1) Keanggotaan, suatu organisasi internasional harus memiliki anggota setidaknya dua negara berdaulat, walaupun keanggotaan organisasi internasional tidak dibatasi, namun harus merupakan perwakilan resmi negara. (2) Ujud, yang mana dengan adanya ujud pembentukan ini dapat mendorong pencapaian kepentingan bersama di antara para anggota. (3) Struktur formal, untuk keberlanjutan dari pembentukan organisasi internasional tersebut yang kemudian diimplementasikan ke dalam perjanjian ataupun dokumen konstituen.

Kerja sama merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam menyelesaikan sebuah kepentingan. Negara perlu melakukan kerja sama internasional untuk mempermudah mencapai kepentingannya. Kerjasama menurut Kalevi Jaako Holsti, memiliki beberapa definisi: (1998: 652-653) (1) Adanya dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan sama yang menghasilkan sesuatu yang kemudian berusaha dipenuhi oleh semua pihak. (2) Merupakan harapan bagi suatu negara bahwa dengan mengikuti kebijakan negara lain akan membantu mencapai kepentingan bersama dari negara tersebut. (3) Persetujuan dari segala macam permasalahan yang berbeda, diantara beberapa negara dalam persamaan kepentingan. (4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. (5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Atas dasar kerangka pemikiran diatas maka penulis menarik suatu hipotesis sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya bahwa pemerintah Indonesia memerlukan bantuan ECPAT Indonesia untuk menangani pariwisata seksual anak di Jakarta.

PEMBAHASAN

Pariwisata seksual anak (PSA) merupakan salah satu tindak kejahatan yang termasuk dalam eksploitasi seksual anak. Menurut ECPAT Internasional, PSA adalah sebuah tindakan eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu

tempat ke tempat yang lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak-anak. Sederhananya, anak dijadikan pemuas seks di tempat-tempat wisata. Eksploitasi seksual anak (ESKA) itu sendiri adalah kekerasan atau kerja paksa yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak sebagai korban seksual dan komersial. Terdapat berbagai bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak, yaitu prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, perkawinan anak atau pernikahan dini dan pariwisata seks anak.

PSA dilakukan orang-orang yang berkunjung ke tempat pariwisata namun terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: (ECPAT 2008: 12) (1) Wisatawan Seks Anak Situasional. Pelaku seks anak situasional merupakan wisatawan yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak pada dasarnya hanya untuk coba-coba saat ada kesempatan. (2) Wisatawan Seks Anak Preferensial. Pelaku preferensial memiliki niat untuk melakukan seks dengan anak-anak di tempat wisata. Mereka biasanya telah menghubungi penyedia-penyedia pekerja seks anak di tempat wisata. (3) Pedofil. Pedofil merupakan seseorang yang memiliki kecenderungan berhubungan seks dengan anak-anak dibawah umur. Para wisatawan seks anak biasanya telah memiliki sasaran tertentu agar mereka dapat melakukan pariwisata seks. Anak yang menjadi sasaran pariwisata seks biasanya memiliki karakteristik tertentu seperti: (ECPAT, 2008: 15) hidup dalam kemiskinan, berasal dari kelompok minoritas, bergantung pada ekonomi musiman, anak-anak yang bekerja, tinggal di jalanan, mengalami kekerasan atau penelantaran di rumah, serta anak yatim piatu yang terkena AIDS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia, pelaku ESKA tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami ketidak stabilan jumlah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

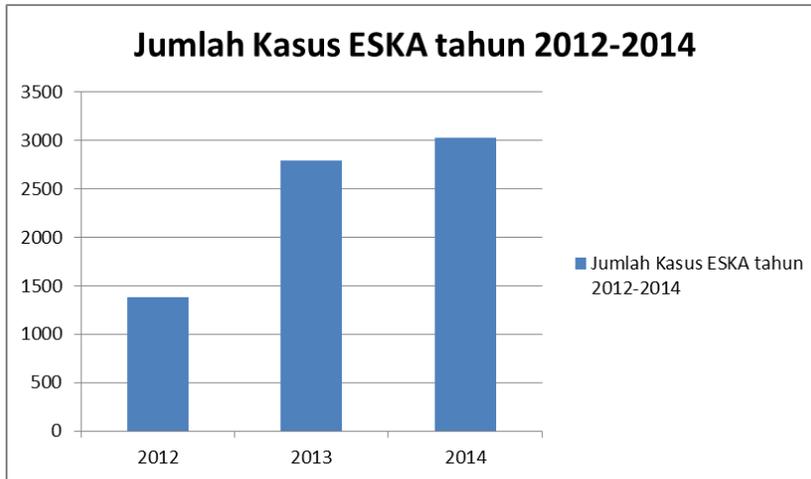
Tabel 2 Jumlah Pelaku ESKA di Indonesia

TAHUN	KELOMPOK UMUR						TOTAL
	18-29	30-39	40-49	50-59	>60	Lain-lain	
2010	2	4	1	1	1	2	11
2011	2	17	5	2	0	1	27
2012	1	16	5	1	9	1	33
2013	4	24	9	12	1	2	52
2014	10	20	13	12	1	2	58
2015	0	4	0	0	0	0	4
TOTAL	19	85	33	28	12	8	185

Sumber: ECPAT Indonesia 2016

Kasus ESKA yang terjadi di Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2014 juga terus mengalami kenaikan. Hal tersebut digambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 1 Jumlah Kasus ESKA di Indonesia Tahun 2012-2014



Sumber: Organisasi Perempuan NU 2014

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki data yang berbeda dengan grafik diatas. Berdasarkan data yang diolah dari KPAI, kasus ESKA di Indonesia tidak mencapai angka 3000 kasus.

Grafik2 Jumlah Kasus ESKA di Indonesia Tahun 2012 hingga Juni Tahun 2016



Sumber: Diolah dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2016

Selama bulan September, Oktober dan November tahun 2016, ECPAT Indonesia menemukan bahwa terdapat sebanyak 335 orang korban kejahatan ESKA yang terjadi di Indonesia. 55% dari jumlah tersebut berjenis kelamin perempuan dan 45% berjenis kelamin laki-laki. Walaupun demikian, berdasarkan hasil pemantauan ECPAT Indonesia, selama tahun 2016 hingga tahun 2017, hanya 21 kasus yang berlanjut ke wilayah hukum hingga proses putusan pengadilan.

Menurut survey dari Economic Intelligence Unit, DKI Jakarta menjadi kota nomor satu yang paling tidak aman dari 50 kota di seluruh dunia. Daerah Jalan Enggano, Pelabuhan Tanjung Priok, Sawah Besar, Mangga Besar, Jatinegara, Senen, Sarinah, Kemang, Kali Angke dan Pecenongan menjadi tempat maraknya eksploitasi seksual terhadap anak. Anak-anak yang dipekerjakan berusia antara 14 hingga 16 tahun yang kebanyakan adalah perempuan. Salah satu mucikari di Tanjung Priok mengungkapkan bahwa kebanyakan pelanggan yang datang ke Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah para pekerja pelabuhan yang terutama berasal dari Myanmar. Selain itu, pengguna PSA juga berasal dari Thailand, Malaysia, Bangladesh, Korea, China, Arab Saudi, Australia dan Inggris. Mereka biasanya merupakan pekerja konstruksi, pekerja proyek, ekspatriat dan wisatawan yang sedang singgah di DKI Jakarta. (ECPAT Indonesia, 2016)

ECPAT merupakan organisasi internasional, karena organisasi internasional dapat berupa Multinational Corporations (MNCs), Intergovernmental Organisations (IGOs), Non-governmental Organisations (NGOs). ECPAT juga telah memenuhi tiga kriteria untuk menjadi sebuah organisasi internasional, yaitu keanggotaan, ujud dan struktur formal. Pada awalnya ECPAT hanya sebuah kampanye untuk menyelesaikan pemasalahan prostitusi anak dalam pariwisata Asia namun berkembang menjadi sebuah organisasi. Tahun 1990, ECPAT yang saat itu merupakan kependekan dari End Child Prostitution in Asian Tourism mengekspresikan kemarahan mereka pada kekerasan anak dalam kampanyenya yang pertama. PSA menjadi isu paling penting dalam ECPAT, karena pada awalnya ECPAT adalah sebuah kampanye yang bertujuan untuk melawan pariwisata seks anak yang marak di negara Thailand, Sri Lanka dan Filipina. Keanggotaan ECPAT awalnya terdiri dari tiga negara yaitu Thailand, Sri Lanka dan Filipina. ECPAT kemudian memenuhi kriteria ujud. Dengan adanya ujud pembentukan ini, negara-negara dapat mendorong pencapaian kepentingan bersama mereka. Setelah kampanye ECPAT berhasil menarik berbagai negara untuk peduli terhadap kekerasan anak, tahun 1996 kongres dunia mengenai konsep Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) pertama kali dibuat. Kongres ini bertujuan untuk menjelaskan konsep perbedaaan antara eksploitasi seksual untuk tujuan keuntungan finansial dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual terhadap anak. ECPAT juga mengemukakan pendapat bahwa anak dalam kasus CSEC merupakan korban para pelaku kejahatan seksual anak. Dalam konsep ESKA, istilah kekerasan seksual anak dimasukkan karena kekerasan seksual anak merupakan bentuk lain dari eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Tahun 1997, ECPAT membentuk sebuah struktur formal. ECPAT yang pada awalnya hanya sebuah kampanye berubah menjadi organisasi internasional non pemerintah. Kepanjangan dari ECPAT pun berubah menjadi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose. Ini bertujuan untuk memperluas tujuan dan memperbesar wilayah penyebaran anggota ECPAT Internasional, sehingga tidak hanya terfokus pada wilayah Asia saja namun juga internasional. (ECPAT Internasional, 2011)

ECPAT Indonesia sebagai organisasi non pemerintah berusaha membantu pemerintah Indonesia agar penyelesaian dan penanganan PSA di DKI Jakarta menjadi lebih mudah. Berdasarkan teori liberalisme institusional, Indonesia sebagai sebuah negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, namun bukan berarti Indonesia menjadi satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional. Selain negara, terdapat organisasi internasional seperti Multinational Corporations (MNCs), Intergovernmental Organisations (IGOs), dan Non-governmental Organisations (NGOs) yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Negara merupakan aktor yang rasional sehingga selalu mencari keuntungan dalam segala aspek kepentingan. Kepentingan pemerintah Indonesia untuk menagani permasalahan

pariwisata seks anak di Indonesia yang ada di DKI Jakarta perlu diselesaikan sesegera mungkin agar tidak banyak lagi anak-anak yang terlibat menjadi korban. Untuk menyelesaikan masalah PSA, Indonesia bekerja sama dengan organisasi yang khusus menangani ESKA. Dengan bekerja sama dengan ECPAT Indonesia, pemerintah Indonesia menjadi lebih diuntungkan karena ECPAT Indonesia membantu pemerintah Indonesia memberikan aksi-aksi khusus untuk menangani permasalahan PSA yang ada di Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta sehingga, permasalahan tersebut dapat menurun di tahun-tahun selanjutnya. Kerja sama yang terjadi antara Indonesia dan ECPAT Indonesia tidak akan terjadi tanpa adanya permasalahan. Permasalahan ESKA di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2014 terus mengalami kenaikan.

Permasalahan PSA membuat negara memiliki kepentingan untuk menyelesaikannya. Kerja sama merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam menyelesaikan sebuah kepentingan. Dalam menyelesaikan PSA di DKI Jakarta, Indonesia melakukan kerja sama dengan organisasi non pemerintah yaitu ECPAT Indonesia. Kerja sama sendiri memiliki beberapa definisi salah satunya adalah adanya kepentingan, nilai, atau tujuan sama yang menghasilkan sesuatu yang kemudian berusaha dipenuhi oleh semua pihak. Pemerintah Indonesia dan ECPAT Indonesia memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ESKA termasuk PSA di DKI Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia. Kerja sama tersebut kemudian diwujudkan dengan adanya transaksi antar negara, antar organisasi atau antara negara dan organisasi. Transaksi antara pemerintah Indonesia dan ECPAT Indonesia berupa workshop atau pelatihan, kampanye dan pendampingan di proses hukum atau setelahnya. ECPAT Indonesia berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya memerangi PSA dengan cara melakukan kerjasama dengan aktor-aktor yang terlibat dalam bidang pariwisata. Tidak hanya wisatawan dan masyarakat di sekitar tempat pariwisata saja, pariwisata juga melibatkan sektor pemerintah nasional, pemerintah daerah serta swasta di dalamnya.

(a) Kerjasama ECPAT Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. ECPAT Indonesia bekerja sama dengan P.T. Angkasa Pura II yang dibawah oleh pemerintah Indonesia. Angkasa Pura II bersama dengan ECPAT Indonesia memperkenalkan kampanye anti pariwisata seks anak di DKI Jakarta. Kampanye anti pariwisata seks anak ini bertujuan untuk membuat turis-turis yang datang mengetahui bahwa Indonesia memerangi eksploitasi seksual anak di tempat pariwisata secara serius. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat akan akibat yang diterima apabila mereka mendukung adanya kekerasan seksual dan eksploitasi anak di Indonesia. (ECPAT Internasional, 2016) ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan institusi pemerintahan terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementrian Sosial RI, yaitu shelter Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada para korban sebelum mereka dipulangkan ke keluarga mereka masing-masing. Selain itu, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan KPPPA (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk menyampaikan laporan-laporan yang perlu ditindak lanjuti oleh KPPPA. (ECPAT Internasional, 2016) Dalam beberapa kasus ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan Komisi Yudisial sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan hukum di Indonesia terkait dengan kasus-kasus yang dapat memberatkan korban. Mereka juga dapat membantu apabila hakim pengadilan memberikan keputusan yang melawan balik dan merugikan korban maupun saksi kasus ESKA di pengadilan. (ECPAT Internasional, 2016) ECPAT Indonesia juga telah menandatangani MOU (Memorandum of Understanding) dengan Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2015. MOU ini bertujuan untuk membantu POLRI dalam menangani permasalahan ESKA yang ada di Indonesia. Sehingga,

ECPAT Indonesia dapat memberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai eksploitasi seksual anak termasuk pariwisata seksual anak di dalamnya. (www.ecpatindonesia.org) Setelah penandatanganan MOU tersebut, ECPAT Indonesia kemudian mengadakan workshop di LEMDIKLAT (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan) POLRI pada Agustus 2016. Workshop ini bertujuan untuk melaksanakan program kerjasama Indonesia dan ECPAT Indonesia dalam Training of Trainers (ToT) Kepolisian dalam menangani ESKA. Sehingga apabila terjadi kasus yang berhubungan dengan ESKA, polisi diharapkan mampu mengatasi dan memberikan penegakan hukum yang adil. (www.ecpatindonesia.org)

(b) Kerjasama ECPAT Indonesia dengan Pemerintah DKI Jakarta. Untuk penanganan PSA di wilayah sekitar tempat pariwisata, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahun 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan ECPAT Indonesia melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Daerah Tujuan Wisata. Terdapat beberapa daerah yang menjadi sasaran kegiatan ini, salah satunya DKI Jakarta. DKI Jakarta menjadi tempat pertama yang dituju untuk melaksanakan pelatihan ini. (www.ecpatindonesia.org)

(c) Kerjasama ECPAT Indonesia dan Swasta dalam Menangani Pariwisata Seks Anak. ECPAT Indonesia telah bekerja sama dengan Accor Hotel Group untuk menyuarakan anti pariwisata seks anak termasuk prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Selain itu, sejak Desember 2006, Accor Indonesia telah memasukkan kampanye anti kekerasan pada anak di film yang ditayangkan di pesawat Garuda Indonesia. Tahun 2014, Accor Indonesia bekerja sama dengan salah satu anggota ECPAT Indonesia, yaitu Yayasan Bahtera yang berada di Bandung untuk memberikan kampanye “Stop Kekerasan Anak” yang melibatkan jaringan ECPAT Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan Bandung. Kampanye ini berusaha untuk mempromosikan pencegahan ESKA di tempat pariwisata. (ECPAT Internasional, 2016) Di bidang transportasi, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan Taksi Putra Jakarta untuk melakukan pelatihan dan memberikan pengetahuan bagi para supir taksi mengenai bahaya PSA, sehingga mereka menjadi lebih waspada terhadap penumpang mereka yang berusaha mencari informasi tentang pariwisata seks di Indonesia. Taksi Putra Jakarta juga mendukung sosialisasi pencegahan PSA dengan memberikan pengumuman tentang PSA di taksi mereka. (ECPAT Internasional, 2016) ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan jasa bantuan hukum bagi para korban eksploitasi dan kekerasan seksual anak, seperti korban pariwisata seks anak, pornografi anak, pedofil, prostitusi anak secara online dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Jasa bantuan hukum ini ditawarkan dari polisi hingga tingkat pengadilan. ECPAT Indonesia juga menyediakan bantuan seperti sesi konseling, pemeriksaan secara medis (visum), dan bantuan keuangan untuk mengurangi beban anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, ECPAT Indonesia juga dapat membantu memberikan perlengkapan pribadi seperti popok bayi atau susu, apabila korban masih bayi, serta dapat memulangkan korban ke daerah asal rumah mereka. (ECPAT Internasional, 2016) ECPAT Indonesia juga memberikan kampanye-kampanye tentang kepedulian terhadap anak-anak korban ESKA yang bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia. Kampanye ini pertama kali berlangsung di Jakarta pada 2010 yang turut mengundang media nasional. Bersama dengan The Body Shop Indonesia, ECPAT Indonesia berusaha memberikan pengetahuan mengenai ESKA yang semakin cepat berkembang. (www.ecpatindonesia.org)

(d) Kerjasama ECPAT Indonesia dan Masyarakat dalam Menangani Pariwisata Seks Anak. ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia

(ASPPI). ASPPI merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang anggotanya berada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Anggota ASPPI merupakan pelaku pariwisata, termasuk penyedia jasa penginapan, transportasi dan perjalanan pariwisata. Sehingga, ASPPI diharapkan mampu membantu membersihkan pariwisata Indonesia dari permasalahan pariwisata seks anak. (www.ecpatindonesia.org) Organisasi anak-anak muda juga menjadi sasaran ECPAT Indonesia untuk melakukan kerjasama. Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KOMPAK) Jakarta bekerja sama dengan ECPAT Indonesia untuk memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual anak bagi anak-anak muda. KOMPAK Jakarta juga dapat menjadi sebuah media bagi anak-anak dan remaja supaya mereka dapat menghindari dan memiliki informasi tentang pariwisata seks anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Tahun 2014, KOMPAK Jakarta mengadakan sebuah kampanye kreatif dalam bentuk pertunjukan musik dan seminar kepada anak-anak sekolah. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan informasi pencegahan eksploitasi seksual komersial anak serta membangun kesadaran anak-anak muda untuk ikut dalam usaha ECPAT Indonesia untuk memerangi PSA. (ECPAT Internasional, 2016) Pada Desember 2016, ECPAT Indonesia juga berusaha memperkenalkan kejahatan Eksploitasi Seksual Anak kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Bina Nusantara. ECPAT Indonesia memberikan workshop yang bertema Pelatihan Gerakan Gerakan Bantuan Hukum untuk Menciptakan Keadilan bagi Eksploitasi Seksual Komersial Anak kepada mahasiswa jurusan Business Law. Pelatihan ini berusaha untuk memberikan pengetahuan mengenai maraknya isu eksploitasi seksual anak di Indonesia. (www.ecpatindonesia.org)

KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai peran ECPAT Indonesia dalam membantu pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pariwisata seks anak yang terjadi, khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Pariwisata seks anak saat ini menjadi salah satu permasalahan yang memiliki perkembangan yang sangat cepat. Untuk menangani permasalahan tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Di tahun 2012 hingga tahun 2014, kasus eksploitasi seksual komersial anak sempat mengalami kenaikan, namun, tahun 2015 hingga tahun 2017 kasus eksploitasi seksual komersial anak yang tercatat tidak setinggi di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang kuat antara pemerintah Indonesia dan ECPAT Indonesia sebagai organisasi internasional non pemerintah. Peran ECPAT Indonesia dalam membantu pemerintah Indonesia menangani pariwisata seks anak di DKI Jakarta terbagi dalam tiga sektor. Di sektor pemerintah, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan pemerintah nasional dan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada korban yang terlibat dalam kasus pariwisata seks anak, membantu pemerintah dalam proses penanganan kasus, mengadakan kampanye di wilayah-wilayah pintu masuk wisatawan mancanegara serta memberikan pelatihan untuk penanganan kasus pariwisata seks anak. Di sektor swasta, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan jasa bantuan hukum bagi korban tidak mampu yang terlibat kasus pariwisata seks anak. Selain itu, ECPAT Indonesia juga memberikan kampanye anti pariwisata seks anak melalui perusahaan-perusahaan swasta di DKI Jakarta. Agar masyarakat lebih waspada dan menghindari permasalahan pariwisata seks anak, ECPAT Indonesia memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pariwisata seks anak melalui organisasi masyarakat.

REFERENSI

- Archer, Clive. 1992. *International Organization*. London: Allen & Unwin Ltd.
- Barnett, Michael dan Raymond Duvall. 2004. *Power in Global Governance*. Cambridge University Press.
- Baylis, John, Steve Smith dan Patricia Owens. 2011. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations 5th Edition*. Italy: Oxford University Press.
- Buzan, B.. 1991. *People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*. Hempstead : Harvester Wheatsheaf.
- Cresswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, quantitative and method Approached*. California: Sage Publication.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (terj)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Keohane, Robert O. 1989. *International Institution and State Power: Essays in International Relations Theory*. Boulder: Westview Press.
- Keohane, Robert O. dan Judith Goldstein. 1993. *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*. Ithaca: Cornell University Press.
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perwita, B., dan Yani, Y.M.. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- ECPAT Indonesia, (2016). *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism: Country Specific Report Indonesia*, [pdf] dalam <http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/3.-SECTT-INDONESIA.pdf>, diakses pada 08 Oktober 2017.
- ECPAT Internasional, (2008). *Combating Child Sex Tourism: Question and Answer*, [pdf] dalam http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/cst_faq_eng.pdf, diakses pada 11 September 2017.
- ECPAT Internasional, (2011). *Global Monitoring Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children: Indonesia*, [pdf] dalam http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/a4a_v2_eap_indonesia.pdf, diakses pada 02 Juni 2018.
- ECPAT Internasional, (2015). *ECPAT 25 Years: Rallying The World to End Child Sexual Exploitation*, [pdf] dalam http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/ECPAT%2025%20Years_FINAL.pdf, diakses pada 02 Juni 2018.
- Eddyono, Supriyadi Widodo & Ermelina Singereta. *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia*, [pdf] dalam <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/03/Penanganan-Kasus-Eska-di-Indonesia.pdf>, diakses pada 08 Oktober 2017.